

**KOLONIALISME DALAM PUSARAN KONFLIK PEMBAHARUAN ISLAM:
Menelusuri Keterlibatan dan Peran Belanda dalam Keberlangsungan Konflik
yang Terjadi di Minangkabau**

Ihsan Sanusi

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang

email: ihsansanusi0478@gmail.com

Abstract

At the beginning of the conflict in the Minangkabau realm, only fellow brothers and sisters (brother conflict), fellow community members. However, this was widespread, and subsequently changed significantly with the interference of foreign powers. Foreign interference itself, basically it cannot be separated from the demands of the adat (traditional leaders or the leaders). How to explain and understand all this? Of course it's not too difficult to understand. Because, in fact with the increasing Paderi movement, many traditional leaders were eliminated, then expelled or even ran away, because they did not want to be victims of Paderi's radicalism. Between those who fled, there were those who sought relations with foreigners, first with Raffles in Bengkulu, then also when Britain was entrenched in Padang. Next, with Du Puy in Padang when the Dutch returned to West Sumatra. The conflict of the rise of Islam in Minangkabau became increasingly complex with the influx of foreign influences - especially the Dutch, who wanted to instill power in Minangkabau. Dutch power, has become a kind of third party that plays a role in the continuation of the conflict of renewal of Minangkabau Islam. The facts above are also strengthened by various proofs of the involvement and role of the Dutch in the war against the Padrians. In addition, there was a testimony from the Dutch people themselves, who had served in the Minangkabau.

Keywords: Dutch Colonialism, Islamic Awakening, and Conflict

Abstrak

Pada awal konflik di Alam Minangkabau hanya terjadi sesama saudara (konflik bersaudara), sesama masyarakat. Namun, ini meluas, dan selanjutnya berubah secara signifikan dengan campur tangannya kekuasaan asing. Campur tangan asing itu sendiri, pada dasarnya memang tidak bisa dilepaskan dari permintaan kaum adat (tokoh adat atau para penghulu). Bagaimana menjelaskan dan memahami ini semua? Tentu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Karena, sesungguhnya dengan makin meningkatnya gerakan Paderi, banyak para penghulu adat yang tersingkirkan, kemudian terusir atau malah melarikan diri, karena tidak ingin menjadi korban "radikalisme" Paderi. Antara mereka yang melarikan diri, ada yang mencari hubungan dengan bangsa asing, mula-mula dengan Raffles di Bengkulu, kemudian juga ketika Inggris yang sudah bercokol di Padang. Selanjutnya, dengan Du Puy di Padang sewaktu Belanda kembali lagi di Sumatera Barat. Konflik kebangkitan Islam di Minangkabau, menjadi semakin kompleks dengan masuknya pengaruh asing-terutama Belanda, yang ingin menanamkan kekuasaan di Minangkabau. Kekuasaan Belanda, telah menjadi semacam pihak ketiga yang memainkan peranan dalam keberlangsungan konflik pembaharuan Islam Minangkabau. Fakta-fakta di atas juga diperkokoh dengan

2 Kolonialisme dalam Pusaran Konflik...

berbagai bukti keterlibatan dan peranan Belanda dalam perang melawan kaum Paderi. Selain itu ditambah dengan adanya kesaksian dari orang-orang Belanda sendiri, yang pernah bertugas di Minangkabau.

Kata Kunci: Kolonialisme Belanda, Kebangkitan Islam, dan Konflik

PENDAHULUAN

Konflik kebangkitan Islam yang berawal dari pemurnian Tuanku Nan Tuo, dan dilanjutkan secara relatif radikal di bawah komando “Harimau Nan Salapan” dengan berbagai pihak. Pada awal konflik hanya terjadi sesama saudara (konflik bersaudara), sesama masyarakat di Alam Minangkabau. Namun, ini meluas, dan selanjutnya berubah secara signifikan dengan campur tangannya kekuasaan asing. Campur tangan asing itu sendiri pada dasarnya memang tidak bisa dilepaskan dari permintaan kaum adat (tokoh adat atau para penghulu). Bagaimana menjelaskan dan memahami ini semua? Tentu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Karena, sesungguhnya dengan makin meningkatnya gerakan Paderi, banyak para penghulu adat yang tersingkirkan, kemudian terusir atau malah melarikan diri, karena tidak ingin menjadi korban “radikalisme” Paderi. Antara mereka yang melarikan diri, ada yang mencari hubungan dengan bangsa asing, mula-mula dengan Raffles di Bengkulu, kemudian juga ketika Inggris yang sudah bercokol di Padang. Selanjutnya, dengan *Du Puy* di Padang sewaktu Belanda kembali lagi di Sumatera Barat. Konsekuensinya, konflik yang berujung perang berlangsung antara gerakan Paderi melawan Belanda berlangsung cukup lama (\pm 17 tahun). Dengan ini praktis, gerakan yang diawali dengan gerakan pembaharuan dan pemurnian di bidang agama, bertukar (tepatnya ditambah)

menjadi perjuangan mengusir penjajahan asing di Minangkabau.

Gerakan kebangkitan Islam ini, bisa dikatakan pada mulanya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang Belanda. Paderi juga tidak ada niat sama sekali mengajarkan aliran mereka pada bangsa asing.¹ Begitu juga dengan orang-orang Inggris pun tidak mempunyai hubungan dengan mereka. Hanya saja pada saat konflik Paderi memuncak, di pantai Barat Sumatera sedang berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1818 Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles mengunjungi Padang.² Tepatnya tanggal 14 Juli 1818, Raffles dengan rombongannya (termasuk di dalamnya 50 orang serdadu Inggris), berangkat dengan berjalan kaki, dari Padang menuju pusat peradaban Minangkabau di daerah darek.³

Sebagai Letnan Gubernur Bengkulu Raffles, berusaha untuk mendirikan otoritas Inggris di Minangkabau, dengan membangun Benteng (loji) di Simawang, namun usaha menancapkan otoritas itu gagal. Orang-orang Belanda menyebut ini adalah kontak buruk, dan sekaligus sebagai orang Eropa pertama mendapat

¹ Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981)

² Lihat Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), h. 157

³ Thomas Stamford Raffles, “Menuju Sumber Peradaban Melayu”, dalam Anthony Reid, *Sumatera Tempo Dolo: dari Marco Polo sampai Tan Malaka*, Terj. Tim Komunitas Bambu, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), h. 196-197

pengalaman “sengsara” dari dataran tinggi Minangkabau. Namun, rintisan ini sangat bermakna bagi Belanda masa berikut pada tahun 1819, pasukan Belanda menggantikan pendudukan Simawang dimana perang Paderi dimulai, dan Orang Belanda bisa belajar mengenal Minangkabau dari dekat.⁴ Pada saat itu, kaum adat mengharapkan bantuan dari Inggris, dua orang Tuanku dari Saruaso yang mewakili raja Minangkabau menghadap Raffles. Raffles melihat berbagai kemungkinan, menimbang untung rugi. Pada pihak lain Raffles juga menghubungi kaum Padri untuk menawarkan jasa baik, tetapi tidak ada persesuaian pendapat. Tujuan Raffles sebenarnya untuk memperoleh daerah subur, oleh karena itu hanya dengan daerah Minangkabau Raffles dapat mengadakan perjanjian setia kawan. Namun, sebagai realisasi dari perjanjian London 13 Agustus 1814, Inggris terpaksa mengembalikan Indonesia kepada Belanda sebagai tukaran daerah Malaka dan Ceylon.

Untuk Lebih jelas bagaimana dinamika keterlibatan Belanda dalam “pemeliharaan” dan keberlangsungan konflik yang terjadi di Minangkabau, maka dalam kajian ini akan dicoba dikemukakan dengan focus utama seputar Keterlibatan Awal Belanda dalam Konflik di Minangkabau dan Keterlibatan Belanda dalam Konflik di Minangkabau Pasca-Paderi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode analisis isi (*content analisis*). Menurut Stempel analisis isi adalah suatu tehnik penelitian yang objektif, sistemik, kuantitatif dan mendeskripsikan isi komunikasi.[4] Paling tidak ada 6 langkah yang digunakan dalam metode ini yaitu: (1) mencari pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti dan teori-teori serta hipotesa apa yang akan digunakan, (2) menyeleksi *sample* dan membuat

pembatasan kategori yang digunakan, (3) menginterpretasikan fakta yang ada berkenaan dengan konsep dan teori yang memadai.[5] Analisis isi yang digunakan dalam tulisan ini lebih bersifat kualitatif. Alasannya adalah: (1) yang dicermati adalah tulisan dalam sebuah karya (buku), (2) tulisan ini menggunakan *sample* untuk melihat dan menganalisis isi sebuah karya (buku) sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Awal Belanda dalam Konflik di Minangkabau

Secara resmi Tanggal 22 Mei 1819 pemerintahan Hindia Belanda kembali tiba di kawasan Pantai Barat Sumatera, ingat sebelumnya 1811-1816 Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Inggris,⁵ Penyerahan pantai barat kepada pemerintahan Hindia Belanda relatif terlambat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Keterlambatan ini disebabkan oleh sikap penguasa Inggris (terutama Raffles) yang mengulur-ulur waktu penyerahannya, daerah pantai Barat Sumatera yang diterima pemerintah Hindia Belanda mencakup kawasan yang merentang dari Singkel di Utara hingga Croe di Selatan. Oleh pemerintah Hindia Belanda daerah ini dibagi menjadi dua *residentie* Padang mencakup daerah-aerah antara Singkel di Utara hingga Indrapura di Selatan. *Residentie* Bengkulu mulai dari Indrapura di Utara hingga Croe Selatan Keresidenan yang disebut terakhir ini hanya ada di atas kertas, sebab Inggris masih berkuasa di sana.⁶

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Belanda setelah menerima daerah ini adalah mengaktualisasikan

⁵ Uli Kozok, *Utusan Damai di Kimmelut Perang: Peran Zending dalam Perang Toba*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 19

⁶ Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 68-69

⁴ H Kroeskamp, *De Westkust En Minangkabau 1665-1668*, h. 157

kekuasaan politiknya.⁷ Sebagaimana yang lazim terjadi di kawasan lain di Nusantara, konflik-konflik internal yang terjadi dikalangan elit pribumi, merupakan sarana yang sering dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk mencapai tujuannya. Dalam suasana konflik, kelompok-kelompok yang bersengketa sering meminta bantuan kepada Pemerintah Belanda. Melalui bantuan ini penguasa pribumi yang lemah dapat diselamatkan posisi politiknya, namun statusnya segera dijadikan sebagai bagian atau bawahan dari struktur pemerintahan Belanda.⁸ Atau, secara tidak langsung sesungguhnya para penghulu yang anti Paderi yang meminta bantuan Belanda telah menyerahkan kedaulatan atas tanah Minangkabau kepada pihak Belanda.⁹

Dalam kondisi ini patut diduga, bahwa intervensi Belanda sangat jelas (tidak bisa dikesampingkan) terkait dengan perebutan akses sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh kelompok Paderi, di samping politik tentunya.¹⁰

Pemerintah Belanda mengambil kesempatan yang sangat baik, dengan usaha ikut terlibat dalam konflik yang terjadi yaitu perang saudara di daerah Minangkabau antara kaum Paderi melawan sebagian sebagian kaum Adat. Pemerintahan Belanda memberi bantuan untuk kaum elit pribumi yang terjepit melawan kaum Paderi, yang bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam memperbaiki adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunah Nabi. Pada tanggal 10 Februari 1821, Residen *Du Puy*

⁷ Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 12

⁸ Gusti Asnan, *Dunia Maritim...*, h. 70

⁹ Uli Kozok, *Utusan Damai...*, h. 19

¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Cet. ke-3, Edisi Pemutakhiran, h. 49

bersama Tuanku Suruaso dan para penghulu yang-yang berjumlah 20 orang,¹¹ mewakili Minangkabau mengadakan perjanjian.¹² Dengan dasar perjanjian ini maka beberapa daerah di Minangkabau diduduki Belanda, langkah Belanda tidak semata-mata ditujukan untuk melawan kaum Paderi, akan tetapi lebih banyak ditujukan untuk menanamkan kekuasaannya. Sehingga, Pada tanggal 18 Februari 1821 Belanda menduduki Benteng Simawang-yang merupakan bekas Benteng Inggris, melalui jalan emas Koto Piliang, Si Pinang, ke Tambangan dan Batipuh.¹³ Sejak itulah dimulainya konflik (perang) Paderi melawan Belanda secara sungguh-sungguh.¹⁴ Dalam batas ini sekaligus terlihat bahwa peranan kaum Adat sebagai musuh (lawan konflik) utama kaum Paderi digantikan oleh Belanda.

Bagaimana perang Paderi melawan belanda ini berlangsung? Dan kenapa Belanda dianggap sebagai satu eksponen yang berperan dalam pusaran konflik pembaharuan Islam di Minangkabau? Uraian berikut akan mencoba mendeskripsikannya secara lebih serius. Untuk periode pertama, dalam kondisi Tanah Datar yang mulai porak-poranda karena perang awal,¹⁵ garnisun Belanda di Simawang di bawah pimpinan *Du Puy*, menyerang Desa Paderi di dekatnya, yaitu Desa Sulit Air 1821¹⁶ -sebuah desa perajin yang sangat bersemangat mendukung gerakan pembaharuan. Dalam laporan

¹¹ Lihat Rusli Amran, *Sumatera ...*, h. 409

¹² Lihat *Ibid.*

¹³ Syafnir Aboe Naim, *Tuanku Imam Bonjol: Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau 1784-1832*, (Padang: Esa Padang, 1993), h. 67

¹⁴ Cristene Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*, Ter. Lilian D. Tedjasudhana, (Jakarta: INIS, 1992), h. 172

¹⁵ Lihat Gusti Asnan, *Dunia Maritim...*, h. 72

¹⁶ Lihat M. D. Mansoer, *et. al.*, *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bharata, 1970), h. 133

Du Puy, selama penyerangan itu, Belanda dapat menghancurkan 3 desa dan merebut 3 meriam kecil. Namun, sedikit berbeda dengan itu (laporan *Du Puy*) itu, E. Francis seorang pegawai reseiden Belanda di Padang yang menulis tahun 1856, bahwa serangan Belanda pada hari-hari pertama jauh dari berhasil. Ketika penyerangan Sulit Air pasukan Belanda dapat dipukul mundur, begitu juga ketika menyerang Sipinang. Korban-korban cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah tentara yang menyerang. Itulah sebabnya semua anjuran *Du Puy* untuk segera mengirim pasukan lebih banyak, tidak segera dituruti Batavia. Malah, ia diminta untuk menyelidiki beberapa kekuatan kaum Paderi sebenarnya dan apakah benar gerakan Paderi ini menguasai seluruh Minangkabau.¹⁷ Penyerangan terus dilakukan, pada tanggal 28 April 1821 ini, Belanda memulai upayanya untuk menghalau Paderi Lintau melintasi pegunungan di sebelah timur, dengan harapan agar Paderi Lintau kembali ke lembah mereka.

Pada tanggal 8 Desember 1821, sampailah di Padang Letnan Kolonel Raaff dengan pasukan hampir 200 orang hingga kekuatan Belanda di Sumatera Barat sekarang meningkat menjadi kira-kira 500 tentara, terdiri atas 200 lebih orang Eropa, 50 orang Bengali dan 140 orang pribumi, diperkuat dengan 5 pucuk meriam dari Padang. Dobbin menyebut, Tokoh utama Belanda yang paling awal, dalam rangka untuk merebut Tanah Datar dan Agam adalah Letnan Kolonel A.T. Raaff ini, ia pendukung tindakan kekerasan militer, dan bergerak serentak untuk menunjukkan kepada para Paderi bahwa Belanda bersungguh-sungguh. dalam hal ini, dia mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Batavia, yang telah mendapat lebih banyak informasi mengenai perdagangan kopi yang berada di tangan kaum Paderi dan

sekarang merasa yakin bahwa sangat menguntungkan saat menguasai Minangkabau.¹⁸

Pada bulan Februari 1822, satu kekuatan ekspedisi Belanda yang terdiri atas 400 anggota infanteri dan artileri berkumpul di dataran, Mereka berkumpul bersama dengan pasukan Minangkabau tertentu yang telah bersedia menjadi tentara cadangan. Pada kesempatan ini, jumlah pasukan cadangan yang ada kira-kira 12.000 sampai 15.000 orang. Jumlah ini menjadi biasa dalam ekspedisi militer Belanda selanjutnya. Orang-orang dalam pasukan ini pulang ke rumah masing-masing hanya pada waktu-waktu tertentu sehubungan dengan pekerjaan pertanian mereka. Seperenam dari mereka bersenjata senapan lokal. Sebelum mendesak Tuanku Lintau kembali ke lembahnya, Raaff merasa perlu untuk merebut desa-desa Paderi yang fanatik di antara Gunung Merapi dan Gunung-Singgalang. Jika desa-desa ini sudah dikuasai, tentara Belanda tidak diserang dari belakang pada waktu mereka maju ke Tanah Datar.¹⁹

Namun, perlawanan dari dalam Tanah Datar begitu kuat sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal itu. Akhirnya, Tuanku Lintau mengumpulkan pasukannya di selatan dan tenggara gurun untuk mengadakan serangan hukuman kepada para penyerbu. Akan tetapi, pada awal bulan Maret 1822, para Paderi dikalahkan dalam pertarungan yang menentukan, dimana Tuanku Lintau pun melarikan diri melewati gunung-gunung ke Lintau. Pada tengah hari tanggal 4 Maret 1822, Belanda menduduki Pagaruyung dan Suruaso. Setelah itu, pusat-pusat lain di sebelah tenggara, Tanah Datar juga direbut. Artinya, dalam masa 1-4 Maret 1822 terjadi berbagai pertempuran sengit, dan pasukan Paderi di bawah Pinpinan Tuanku Lintau dapat dipukul

¹⁸ Cristine Dobbin, *Kebangkitan Islam....*, h. 173

¹⁹ Rusli Amran, *Sumatera....*, h. 411

¹⁷ Rusli Amran, *Sumatera....*, h. 410

mundur.²⁰ Ekspedisi melewati gunung-gunung untuk mencari Tuanku Lintau dianggap terlalu berbahaya; Oleh sebab itu, Raaff memusatkan perhatiannya kepada desa-desa Paderi di pegunungan utara Tanah Datar.

Dalam serangkaian serangan pada bulan Mei 1822, seluruh wilayah antar Rao-Rao dan Tabek Patah direbut. Tempat-tempat pembuatan kerajinan besi dan senjata di Salimpaung dan Sipayang pun juga dihancurkan. Raaff kemudian terus mendesak ke Tanjung Alam karena Limapuluh Kota bisa diamati dari tempat yang tinggi itu, dan ia mendirikan posnya untuk menghadapi kaum Paderi dari lembah. Karena, Serangan Paderi dari berbagai sisi terus berlanjut. Maka, Raaff berpendapat bahwa melakukan pengejaran adalah tindakan terbaik. Dia bergerak dari Tanjung Alam mengitari Gunung Merapi, lalu masuk ke Agam, mencapai Candung dan daerah Kota Tua. Menyadari bahwa dia masih menghadapi bahaya dari sisi Tanah Datar, pada bulan Juli 1822 Raaff berpaling ke desa-desa di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Ia memaksa Kota Lawas, Pandai Sikat, dan lain-lain untuk menyerah. Terjebak di dua sisi, desa-desa Paderi di gunung Merapi seperti Sungai Puar dan Banuhampu akhirnya menyatakan menyerah. Namun, Raaff masih menghadapi para Paderi Lintau yang belum terkalahkan di pegunungan dan lembah-lembah di sebelah timur Tanah Datar. Di Agam, ia juga tidak bisa mengalahkan pasukan Tuanku Nan Rinceh yang berkedudukan di tempat yang hampir tidak bisa ditembus. Markas Tuanku Nan Rinceh ada di sebelah utara daerah Empat Angkat, dengan jurang-jurang dan bukit-bukitnya sebagai benteng pertahanan alami. Para Paderi menduduki seluruh wilayah Bukit Kamang, Tilatang, dan desa-desa di dekatnya. Benteng utama Tilatang, Kapau, dianggap tidak terpatahkan. Dengan harapan bisa

membebaskan diri dari serangan akhir Tuanku Lintau, pasukan Belanda menyerang pertengahan Tuanku Nan Rinceh pada bulan Agustus 1822. Akan tetapi, Kapau terbukti tidak bisa ditembus, hingga semua serangan pertama gagal sama sekali dengan banyak korban yang jatuh di pihak Belanda, kemudian Belanda pun terpaksa mundur ke Tanah Datar.

Pada saat bersamaan, berdasarkan informasi yang ada bahwa pasukan Paderi dari Bonjol dan daerah-daerah di dekatnya, sedang bergerak ke arah pesisir. Dan bahwa Tuanku Mensiangan juga ikut serta dalam gerakan ini. Suatu siasat yang membahayakan kedudukan Belanda di pedalaman! Sebab, kalau kaum Paderi berhasil memutuskan hubungan antara daerah pegunungan dengan daerah pantai, kedudukan tentara di Tanah Datar akan sulit sekali. Tanpa pikir panjang lagi, Raaff dengan kesatuan-kesatuannya segera berangkat ke Gunung tetapi juga mengirim bantuan ke Tanjung Alam. Wilayah pertama dan terdahulu diserang Pandai Sikek, kemudian mengamankan hubungan antara Kayu Tanam dan Ulakan.²¹

Pada akhir tahun 1822 dan awal tahun 1823, datanglah bantuan dari Jawa. Raaff pun mencoba sekali lagi untuk memantapkan kedudukan Belanda di Tanah Datar dengan merebut Lintau. Dia menyusun rencana besar untuk merebut Lintau dengan menyerang bentengnya di Gunung Marapalam. Sesudah itu, pasukan Belanda akan menyerbu Limapuluh Kota, termasuk ke Agam, dan kembali ke Danau Singkarak. Dengan demikian, Belanda akan mampu menguasai keempat lembah di Dataran Tinggi Minangkabau. Serangan dimulai pada pertengahan bulan April 1823. Namun, serangan ini gagal karena kuatnya kedudukan Paderi di Gunung Marapalam, yaitu satu-satunya jalan mendekati Lintau yang ada di sisi Tanah Datar. Sejak tanggal ini, semangat

²⁰ *Ibid.*, h. 412

²¹ *Ibid.*, h. 422

Belanda untuk ekspansi di Minangkabau menurun. Raaff meninggal di Padang pada bulan April 1824. Setelah itu, tidak pernah lagi ada yang bisa menandingi keberhasilannya di daerah dataran tinggi sampai tahun 1830-an, ketika muncul situasi yang berbeda sekali.²²

Memasuki tahun 1825-1830, ditandai dengan meredamnya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan gerakan Paderi pada tanggal 29 Oktober 1825.²³ Pada masa ini (1824-1829, karena Raaf Sudah meninggal maka dia di gantikan oleh Kolonel Hubert Joseph Jean Lambert de Stuers.²⁴ Sebelum perjanjian ini, pada masa Raaff sudah ada perjanjian antara Belanda dan Paderi yang diwakili oleh Tuanku Imam, Tuanku Itam dan Tuanku Nan Tinggi, dengan perantaraan Van den Berg²⁵, ditandatangani tanggal 22 Januari 1824 di Masang. Ridder de Stuers memuat naskah perjanjian itu dalam bukunya *Vestiging en Uitbreiding van het Nederlandsch Gezag ter Sumatra's Westkust* seperempat abad kemudian.²⁶ Perjanjian ini, isinya terlalu berat sebelah dan mengabdikan praktis semua yang diinginkan Belanda. Sedangkan untuk pihak Paderi sangat minim yang dikabulkan, namun perjanjian itu dalam realitasnya sudah disetujui oleh wakil Paderi. Karena itulah Van den Berg mendapat hadiah cukup banyak (1.500

gulden) untuk jasa-jasanya dalam memuluskan perjanjian ini. De Stuers sendiri mengeritik isi perjanjian ini sebagai tidak masuk akal.²⁷

Perjanjian yang kedua dari pihak Paderi diwakili Tuanku Nan Saleh dari Talawi, Tuanku di Bawah Tabing atas nama Tuanku Guguk dari Limapuluh Kota, Tuanku Keramat atas nama Tuanku Pasaman dari Lintau dan Datuk Ujung sebagai wakil Tuanku nan Rinceh dari Kamang.²⁸ Keempat utusan ini datang ke Padang dengan 5 orang Tuanku lagi diiringi 54 orang pengikut serta 20 pengawal. Isi perjanjian pada dasarnya sudah disiapkan De Stuers, yang kemudian dipelajari dengan seksama oleh utusan Paderi. Isi penting perjanjian itu adalah: 1) Pemerintah Belanda di Batusangkar, Suroaso, Padanggating, Bukittinggi dan Guguk Sigandang berjanji akan melindungi semua pedagang Paderi yang dalam perjalanan, juga yang berada di kota-kota Padang dan Pariaman. 2) Pemerintah Belanda akan mengakui para pemimpin Paderi yang berkuasa di Lintau, Limapuluh Kota, Talawi dan Agam. Akan menghormati mereka dan berjanji akan hidup damai dengan mereka dan rakyat di bawah kekuasaan mereka. Sebaliknya, Pemerintah Belanda mengharapkan: 1) Agar pemimpin-pemimpin Paderi di Lintau, Limapuluh Kota, Agam dan Talaweh, tidak mengganggu para pedagang yang akan memasuki daerah mereka. 2) Para pemimpin kaum Paderi akan berusaha mencegah serangan-serangan dari golongan mereka terhadap kampung-kampung yang berpenduduk bukan Paderi. Sebaliknya, Pemerintah Belanda akan mencegah segala serangan golongan bukan Paderi terhadap kampung-kampung Paderi. 3) Kalau ada orang-orang pengacau dan membuat kesalahan di daerah Paderi, mereka diserahkan kepada Belanda. Dan kalau

²² Cristine Dobbin, *Kebangkitan Islam...*, h. 174

²³ Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 276. Lihat juga Ahmad Mansyur Surya Negara, *Api Sejarah*, (Bandung: Salamadani, 2010), Cet. ke-3, h. 234

²⁴ Karel Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1956-1942)*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 100

²⁵ Lihat lebih jauh Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003), h. 40-41

²⁶ Rusli Amran, *Sumatera... op. cit.*, h. 435

²⁷ *Ibid.*, 446-447

²⁸ Lihat Hamka, *Dari Pembendaharaan Lama*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Cet. ke-2, h. 127

ada orang-orang Pideri mengacau di daerah Belanda, mereka akan diserahkan kepada kaum Paderi.

Dalam perjanjian ini, tidak memuat persolan yang terkait dengan adu jago (ayam) dan mengisap candu. Mula-mula utusan Paderi mendesak agar keduanya dilarang, tetapi akhirnya menerima kompromi, yaitu adu jago dilarang tetapi mengisap candu tidak. Kaum Paderi dapat menerima penjelasan De Stuers bahwa candu bukan untuk mencari uang, tetapi sekedar untuk menguasai dan mengetahui siap-siapa yang berbuat.²⁹ Kemudian, sesudah adu jago tidak diperbolehkan datanglah protes dari Datuk Pamuncak, kepala laras Batipuh atas nama para penghulu dan orang-orang terkemuka lainnya dari daerah tersebut. Pelarangan sangat ditentang Datuk ini karena adu jago telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan tak mungkin dihapus begitu saja. Mereka bersedia membayar, asal kebiasaan itu boleh diteruskan. Kata Datuk Pamuncak, kalau dilarang juga, tindakannya tak bisa dimengerti oleh rakyat dan banyak kesulitan akan tiba. Dia meminta agar De Stuers mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil. Namun, kenyataan adu ayam tetap dilarang dan permintaan dari golongan adat tidak dikabulkan.

Sejalan dengan itu, keinginan de Stuers—sebagai dikutip Graves, untuk menegakkan perdamaian pada mulanya terkendala disebabkan oleh penarikan pasukan mereka, sehubungan dengan meletusnya pemberontakan atau Perang Jawa yang memerlukan pemusatan kekuatan militer Belanda di sana. Sebagai alternatif tindakan militernya, de Stuers mengajukan perjanjian perdamaian dengan Bonjol, yang dianggapnya sebagai kekuasaan kaum Paderi, atas dasar prinsip hidup berdampingan secara damai dan tidak saling campur tangan. Akan tetapi

"insiden-insiden perbatasan" terus terjadi, meskipun ada perjanjian perdamaian dan de Stuers melaporkan, bahwa keadaan anarkis di daerah-daerah Paderi, menurutnya disebabkan oleh perubahan konstan dari kepemimpinan dan ketidakpastian. Para pemimpin Paderi yang lebih tua, seperti Tuanku Pasaman (dari Lintau) nampaknya kehilangan pengaruh di kalangan pengikut-pengikutnya.³⁰

Masa Terakhir keterlibatan Belanda dalam perang Paderi berlangsung antara tahun 1830-1837/8, ditandai dengan perlawanan Paderi yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Menjelang Perang Jawa berakhir tahun 1830 dengan kemenangan Belanda, van den Bosch, yakni Gubernur Jenderal yang baru, kembali mencurahkan perhatiannya terhadap situasi di Sumatera. Sebagai kebijaksanaan umum, ia memutuskan supaya semua penduduk dan raja-raja kecil sebaiknya mengakui kekuasaan Belanda, penguasa di seluruh Hindia-Belanda. Berkenaan dengan Sumatera ia menganggap perlu menguasai perdagangan; selain meminta kerja sama dengan raja-raja kecil, Belanda juga akan menduduki pelabuhan-pelabuhan, muara-muara sungai, dan beberapa pusat pasar tertentu di pedalaman. Benteng-benteng Belanda, garnisum-garnisum (pertahanan militer), gudang-gudang perdagangan akan dibangun di setiap tempat tersebut. Oleh karena Sumatera (berbeda dengan Jawa), menurutnya, terlalu luas untuk dikendalikan oleh seorang militer, maka administrator kolonial di tingkat lokal tentunya tidak cukup mampu menangani secara langsung urusan penduduk bumiputera setempat dan karena itu harus yakin bisa mendorong

²⁹ Lihat Rusli Amran, *Sumatera...*, h. 450

³⁰ Laporan De Stuers 17 Mei 1826 dalam Elizabatt E. Graves, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/ XX*, terj. Novi Andri., *et. al.*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 68

"kegiatan-kegiatan yang menguntungkan".³¹

Namun van den Bosch mengakui, bahwa perdamaian harus dipulihkan di Sumatera Barat, dan untuk tujuan itu dia lalu mengirim tentara tambahan untuk memperkuat tekanan agar mencapai kesepakatan dengan kaum Paderi dan melindungi kembali nagari-nagari yang dikuasai pemerintah. Van den Bosch setuju, bahwa jika semua tindakan untuk hidup berdampingan secara damai dengan Paderi gagal dicapai, maka penguasa-penguasa Belanda setempat diberi kebebasan untuk menyiapkan serangan. Ia pun menyalurkan keinginan Padang untuk melakukan serangan habis-habisan terhadap Minangkabau, jika gerakan Paderi tidak dapat ditekan ke dalam semacam "persekutuan damai" dengan pemerintah Belanda. Pada saat yang sama pejabat Belanda di Sumatera Barat selalu berpendapat, bahwa hanya dengan cara penumpasan total pemimpin Paderi, yang dapat menjamin perdamaian dan sejak itu barulah ada garansi terhadap keuntungan komersial sebagaimana yang diinginkan oleh Batavia. Karena mendapat tekanan terus-menerus dari pejabat Belanda di Padang, Van den Bosch akhirnya terpaksa menyetujui pendapat, bahwa anarkis di pedalaman menyita banyakk energi dan membunuh semangat dagang suatu "masyarakat yang sangat aktif". Ia pun menerima pandangan, bahwa politik lokal harus dibenahi, jalur lalu-lintas harus dibangun untuk menggabungkan daerah produksi di pedalaman dengan pelabuhan pantai, dan pengawasan terhadap penanaman tanaman komoditi ekspor harus dilakukan.³²

Setelah tahun 1832, baik Batavia maupun kekuasaan belanda di Padang, kemudian sepakat, bahwa seluruh Minangkabau harus dikuasai dan dikendalikan di bawah pemerintahn Belanda secara langsung. Bagaimana

cara penguasaan ini harus dilakukan pada gilirannya mengundang beberapa perdebatan seru pada masa-masa berikutnya. Akan tetapi karena masalah Minangkabau sekarang tidak hanya persoalan waktu, sebelum kehidupan nagari diatur kembali dalam bentuk baru, tetapi lebih kuat dan lebih dapat diatur oleh kekuatan dari luar. Dalam kerangka inilah pada tahun 1837, Batavia mengangkat Kolonel Michiels sebagai Gubernur Militer Sumatera Barat. Dia mengajukan target baru dan mempertegas kekuasaan Belanda di daerah ini. Ia memutuskan sendiri untuk meneruskan perang dan menjelang Agustus, puncaknya sampai pada pendudukan benteng Paderi yang terakhir, yaitu Bonjol, yang menyebabkan pertahanan Paderi dibuat kucar-kacir, dan mundur ke hutan-hutan.³³ Kemudian diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin Paderi dengan penyerahan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1837.

Setelah Tuanku Imam Bonjol tertangkap (mungkin tepatnya dikhianati Belanda), maka secara umum perlawanan kaum Paderi dapat dipatahkan pada akhir tahun 1837. Setelah periode tertangkapnya Imam Bonjol ini, praktis kekuasaan Belanda telah tertanam di Sumatera Barat dengan kokohnya. Walaupun berbagai perlawan-perlawanan rakyat dalam skala kecil masih berlangsung sampai tahun 1847-an. Berbagai perlawanan itu dapat dimentahkan oleh Belanda, dengan cepat, di antaranya adalah pada tahun 1841 terjadi perlawanan rakyat Batipuh Padang Panjang. Regen Batipuh jaga telah banyak berjasa dalam membantu Belanda, ia tampil kemuka sebagai pemimpin perlawaann rakyatnya karena merasa dihina dan dikhianati.³⁴

³¹ Elizabeth E. Graves, *op. cit.*, h. 70

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, h. 72

³⁴ Lihat M. D. Mansoer, *et. al*, *Sejarah...*, h. 152-153

Kerterlibatan Belanda dalam Konflik di Minangkabau Pasca-Paderi

Lebih lanjut, setelah Kaum Paderi dapat dikalahkan, Belanda pada dasarnya juga mengakui bahwa pengaruh Paderi, baik dalam bentuk pemurnian maupun “kebencian” terhadap Belanda tidak bisa dihapuskan, atau tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kekuatan Paderi hanya musnah dalam bentuk gerakan fisik, tetapi secara batin, “kekuatan rohani” masyarakat Minangkabau tetap selalu dirasakan. Untuk menghadapi kenyataan ini, Belanda yang tidak mau diganggu eksistensinya melakukan berbagai strategi, yaitu: ³⁵ *Pertama*, mendekati Kaum Paderi yang tidak terlibat secara langsung dalam perang untuk melakukan kerjasama.

Kedua, dalam batas-batas tertentu Belanda memberikan dukungan dan pujian terhadap para tokoh tarekat (sufi ortodhok). Dengan menguatkan tradisi tarekat ini, maka diharapkan semangat jihad yang diilhami oleh ajaran tauhid akan kendor.³⁶

Ketiga, Belanda ikut terlibat langsung dalam pengaturan sistem pemerintahan (kekuasaan) nagari tradisional Minangkabau-yang mana ini sudah dimulai dari sejak perang Paderi berlangsung. Belanda membentuk “aristokrasi” buatannya sendiri, dengan perjuangan yang cukup lama, pertama gelar-gelar diciptakan semua meniru keadaan yang ada pada tempat lain terutama Jawa. Harus diingat semua gelar atau pangkat ini ialah di luar adat. Ia tidak ada hubungannya dengan adat yang berlaku dan itu jelas dipaksakan pada rakyat, seperti *regent*, kepala laras, penghulu kepala, penghulu suku rodi dan akhirnya demang. Orang-orang yang diangkat pada awalnya adalah orang-orang yang mau kerja sama dengan Belanda dengan gaji, ditambah insentif-insentif lainnya. Karena

mendapat tantangan, Belanda mencoba mengangkat orang-orang berasal dari lingkungan penghulu asli, namun tidak semuanya juga semua berhasil. Jika pun ada berhasil diangkat, maka tetap mereka menjadi ejekan rakyat. Mereka diangkat “dengan surat pengangkatan”-semacam SK sekarang, kemudian mendapat pangkat yang tidak ada dalam kebiasaan yang dianut masyarakat selama berabad-abad. Namun, harus diakui segala tantangan maupun ejekan kian melemah manakala Pemerintah Hindia Belanda makin kuat kedudukannya di Minangkabau.³⁷

Pada saat Belanda sudah melebarkan sayap di Minangkabau, setidaknya sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Belanda bulan November 1823 diciptakanlah 2 *regen* kepala. Minangkabau (sekitar wilayah Sumatera Barat sekarang) pada waktu itu dibagi menjadi 2 bagian (*hoofdafdeling*), dengan seorang *regent* kepala untuk masing-masing yaitu Padang dan Minangkabau (*darek*). Kemudian ditambah 4 *regen* di Pariaman, Salido, Indrapura dan Tanah Datar-Agam. Ditambah lagi dengan Bonjol, Rao, Batipuh dan Halaban. Jumlah ini kemudian diperkecil, pangkat *hoofd regent* (*regen* kepala) dihapus, dan yang tinggal cuma di Indrapura dan Padang saja. Pada saat perang Paderi usai, kopi menjadi komoditi paling penting. Dalam konteks ini yang paling dibutuhkan malah kepala laras kira-kira pertengahan abad ke-19, sudah mencapai lebih dari 100 kepala laras.³⁸

Senada dengan itu, Gusti Asnan menyatakan bahwa setelah perang Paderi usai, pemerintah Hindia Belanda membenahi struktur pemerintahannya kembali. Tahun 1837, berawal dari peningkatan status Resident van Padang menjadi *Gouvernement van Sumatera's Westkust* dengan posisi tertinggi dijabat

³⁷ Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), h. 189

³⁸ Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*, (Jakarta: Yasaguna, 1988), Cet. ke-2 diperlengkap, h. 168

³⁵ Hamka, *Islam dan Ada...*, h. 174

³⁶ *Ibid.*, h. 174

oleh gubernur, yang dibagi kepada 3 *residentiea*, yaitu *Padangsche Benedenlanden*, yaitu daerah pesisir bagian selatan, *residentie van Padangsche Bovenlanden*, yaitu daerah pedalaman, serta *residentie van Tapanoeli*, yaitu daerah bagian utara. *Residentie* dipimpin oleh seorang Residen dan dibantu oleh Asisten Residen. Ditingkat paling bawah terdapat *Controleur*. Sesuai dengan luas daerah dan tingkat kerawannya, maka *Controleur* yang ditempatkan di beberapa daerah dibagi lagi menjadi *Controleur* tingkat I, II, III, dan IV.³⁹ Tahun 1906 *Residentie van Tapanoeli* dilepas, dan kemudian berdiri sendiri. Sedangkan wilayah Minangkabau tetap dinamakan *Gouvernement van Sumatera's Westkust* dengan dua keresidenan.

Memasuki abad ke-20, khusus dalam kebijaksanaan pemerintah Belanda sudah terlihat kontribusi studi ilmiah dalam perumusan kebijakan kolonial Belanda mengenai urusan Islam dan Muslim, yang dimotori Snouck Hurgronje. Dalam studi Jajat Burhanudin, misalnya pengalaman Hurgronje yang bekerja untuk layanan kolonial adalah contoh yang jelas. Dia melakukan studi menyeluruh tentang Islam dan cara orang-orang Muslim mempraktikkan keyakinan religius mereka di arena sosio-politik Hindia. Dan dia mendedikasikan studinya untuk agenda Belanda mengkolonisasi Islam. Ia memulai karirnya berangkat ke Mekah pada tahun 1884, dengan tugas utama untuk menemukan akar ancaman Islam bagi pemerintah kolonial Belanda. Dia kemudian menyelidiki studi lebih lanjut tentang Islam dan kehidupan Muslim di Hindia, dan pada saat yang sama memberi nasihat kepada pihak berwenang Belanda tentang bagaimana isu-isu Islam ditangani.⁴⁰

Isu utama secara konsisten yang menjadi perhatian kolonial adalah status dan fungsi guru agama (ulama) dalam sistem sosial Minangkabau. Isu ini menjadi problema utama yang dihadapi Belanda untuk menerapkan kebijaksanaannya di daerah ini. Dalam kerangka inilah pemerintah Belanda merasa perlu mendekati Kaum Muda yang lebih bersifat revolusioner. Pilihan ini tentu cukup berasal dan logis, karena Kaum Muda sendiri sejak awal memang “tidak berminat” untuk mengembangkan politik dalam organisasi mereka. Masing-masing nagari di Minangkabau bertanggungjawab atas masalah-masalah yang muncul di nagarnya. Secara khusus nagari tidak mempunyai organisasi adat yang berfungsi untuk menjalankan atau merintangai terjadinya perubahan. Tidak ada pimpinan atau dewan agama yang bisa memutuskan persoalan agama yang terjadi dalam nagari. Fungsi utama fungsionaris agama dan adat seperti Imam, khatib, dan bilal adalah untuk menampilkan upacara agama, mengelola ajaran agama, dan merawat mesjid nagari.⁴¹

Le Febvre sebagai pemimpin pantai Barat Sumatera sejak tahun 1916 sampai 1919 sangat menyadari anjuran Snouck Hurgronje, maka untuk itu ia memakai kebijaksanaan bersifat netral terhadap adat dan agama. Namun, karena guru agama selama ini selalu merupakan ancaman bagi pemerintah Belanda di Minangkabau terutama sekali Ulama Kaum Tua dan organisasi tarekat yang menolak secara total kedatangan pemerintah kafir dengan menyatakan Belanda sebagai “ulando setan”,⁴² yang tidak diharapkan kedatangannya. Pemerintah harus mengadakan kontrol yang keras terhadap sekolah-sekolah agama, terutama sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kaum Tua dengan organisasi

³⁹ Lihat Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003), h. 45-46

⁴⁰ Lihat *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 52, No. 1 (2014), pp. 25-58, h. 52

⁴¹ Taufik Abdullah, *School and Politik...*, h. 62

⁴² Taufik Abdullah, *School and Politik...*, h. 64

tarekatnya. Dalam tataran ini, Le Febvre melaksanakan kebijaksanaan yang bersifat menekan guru tarekat yang tradisional dan konservatif. Selain penekanan terhadap ulama Kaum Tua, pemerintah Belanda juga tidak luput perhatiannya terhadap ulama Kaum Muda.

Tindakan pemerintah untuk membatasi Kaum Ulama secara umum di Minangkabau telah berwujud nyata dengan dikeluarkannya peraturan bahwa seseorang harus minta izin, sebelum memberikan pelajaran agama. Peraturan ini sebenarnya telah diperkenalkan di Hindia Belanda—terutama Jawa sejak tahun 1905 yang terkenal dengan Guru Ordonansi.⁴³ Isu penerapan guru ordonansi di Minangkabau secara tegas itu berawal dari kedatangan, L. De Vries 1928. Awal kedatangannya untuk menjajaki kemungkinan berlakunya Guru Ordonansi, sebagian pemimpin Kaum Muda, misalnya Syaikh Abdullah Ahmad menyetujui peraturan tersebut, akan tetapi para tokoh lainnya Haji Rasul menolak secara tegas. Kaum Tua, seperti Syaikh Sulaiman Arrasuly, Syaikh Muhammad Jamil Jaho, dan Syaikh Khatib Muhammad Ali pada awalnya juga tidak menyetujui, tetapi setelah didekati oleh pejabat Belanda De Vries, ada kecenderungan untuk menerima walaupun tidak secara tegas. Untuk memberikan kepastian atas jawaban para ulama itu kepada pemerintahan, maka diadakan rapat antara Kaum Tua dengan Kaum Muda di Bukittinggi tanggal 18 Agustus 1928.⁴⁴ De Vries sendiri menghadiri rapat antara Kaum Tua dan Kaum Muda tersebut, dan mendengarkan secara langsung penolakan Kaum Sufi terhadap Guru Ordonansi.

Musyawarah besar itu sendiri berlangsung penuh dengan dinamika,

salah seorang peserta mengemukakan pendapat bahwa seorang Muslim harus berani mengajarkan agamanya tanpa rasa takut kepada pemerintah. Walaupun salah seorang berpengaruh Kaum Muda, Syaikh Abdullah Ahmad—tidak hadir dalam pertemuan tersebut, menerima Guru Ordonansi, tetapi rekannya Syaikh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) menolak secara tegas berlakunya peraturan tersebut. Dengan suara yang lantang dan tegas, para ulama yang diwakili oleh lisan Haji Rasul, akhirnya rapat memutuskan bahwa ulama Minangkabau menolak dijalankannya Guru Ordonansi, yang disampaikan secara langsung dihadapan L. De Vries. Haji Rasul mengatakan “sampaikanlah kepada pemerintah tinggi, janganlah dijalankan ordonansi itu di sini, kami tidak berpecah lagi. Kami telah bersatu”.⁴⁵

Walaupun ulama menolak pelaksanaan ordonansi guru, tapi tampaknya pemerintah Belanda dapat “menerima”. Ini patut diduga, bahwa pemerintah menyadari bagaimana besarnya pengaruh alim-ulama di Minangkabau, kalau pemerintah mengambil jalan paksaan akan menimbulkan kegoncangan terhadap kedudukan penjajahan. Hal ini tentu beranjak dari pengalaman, bahwa telah berkali-kali mereka alami karena pemberontakan kaum Muslim melawan kekuasaan, yang semuanya berasal dari kelompok-kelompok surau, yang dipimpin oleh para ulama. Melalui seorang tokoh Kaum Tua yang juga sebagai ketua rapat di Bukittinggi tanggal 19 Agustus 1928, Haji Abdul Majid Abdullah dan Datuk Singomangkuto disampaikan kepada Gubernur Jenderal De Graff bahwa ulama Minangkabau menolak Guru Ordonansi. Dan Gubernur Jenderal memang memberikan jawaban bahwa pemerintah Belanda belum berniat untuk menetapkan berjalannya Guru Ordonansi di Minangkabau.⁴⁶

⁴³ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat*, (Jakarta: Umminda, 1982), h. 166

⁴⁴ Lihat jelasnya Hamka, *Ayahku ...*, h. 168

⁴⁵ Lihat *Ibid.*, h. 170

⁴⁶ *Ibid*

Terlepas dari itu semua, yang jelas kebijaksanaan Belanda ke arah konflik agama di Minangkabau, walaupun jelas membawa efek negatif bagi perkembangan Islam, namun pada saat yang sama telah memperkuat pengaruh Islam itu sendiri dalam masyarakat. Pembagian Islam ke dalam aspek dogmatik dan politik oleh Belanda telah menjadi cetak biru bagi Kaum Muda menjalankan program agama dan sekulernya juga. Walaupun dalam berbagai kegiatannya Kaum Muda menggambarkan perbedaan yang tajam antara agama dan politiknya. Tetapi, secara substansi jelas Ulama termasuk Kaum Muda, melihat doktrin Islam adalah sesuatu yang integral, ia tidak membedakan secara jelas antara kekuasaan temporal dengan spiritual. Artinya saran Snouck dalam hal ini telah memperbesar perluasan gerakan Kaum Muda, karena dalam pandangan ulama, Islam tidak dilihat sebagai aspek yang terpisah.⁴⁷

PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas bisa ditegaskan bahwa konflik gerakan kebangkitan Islam dalam bentuk pembaharuan dan pemurnian Islam kaum Paderi dan Kaum Muda di Minangkabau, dipengaruhi berbagai faktor yang mana kolonialisme Belanda ikut terlibat secara langsung atau tidak dalam memelihara konflik yang terjadi secara berkesinambungan. Berkaca dari gerakan pembaruan awal yang dimulai Tuanku Nan Tuo dan Syaikh Jalaluddin, kemudian bermetamorfosis menjadi cenderung radikal setelah kedatangan tiga orang haji, yang dikoordinir oleh Tuanku Nan Renceh, menjadikan Belanda lebih arif dalam memanfaatkan berbagai gerakan kaum ulama (baik

muda maupun tua) agar tidak mengganggu aksistensi kekuasaannya di Minangkabau. Dalam konteks inilah politik *divide et ampero* efektif dimanfaatkan demi kelanggengan kekuasaan kolonial itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Taufik, Abdullah, (ed.), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991

_____, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, Padang: Fakultas Sastra Uinversitas Andalas Padang, 1988, Ter. A. Guntur dan Lindayanti

Amran, Rusli, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981

_____, *Sumatera Barat Plaka Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985

_____, *Padang Riwayatmu Dulu*, Jakarta: Yasaguna, 1988, cet. ke-2 diperlengkap

Asnan, Gusti, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Ombak, 2007

_____, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003

Boelhouwer, J. C., *Kenang-Kenangan di Sumatera Barat Selama Tahun 1831-1834*, Terj. Sutan Sjahrial, (Padang: Lembaga Kajian Gerakan Padri, (1803-1838) Kerjasama Gemu Minang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2009

⁴⁷ Bandingkan dengan Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, (Padang: Fakultas Sastra Uinversitas Andalas Padang, 1988), Ter. A. Guntur dan Lindayanti, h. 66

- Burhanuddin, Jajat, "The Dutch Colonial Policy On Islam Reading The Intellectual Journey Of Snouck Hurgronje", Dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 52, no. 1 (2014), pp. 25-58
- Dobbin, Cristene, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*, Ter. Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 1992
- Graves, Elizabatt E., *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, terj. Novi Andri, et. al., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Hamka, *Dari Pembendaharaan Lama*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, cet, ke-2
- _____, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat*, Jakarta: Umminda, 1982
- _____, *Islam dan Adat di Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Kozok, Uli, *Utusan Damai di Kimmelut Perang: Peran Zending dalam Perang Toba*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Kroeskamp, H, *De Westkust En Minangkabau 1665-1668*
- M. Sanusi Latief, *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*, (Jakarta: Disertasi doktor IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), [tidak diterbitkan]
- Mansoer, M. D., et. al., *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta: Bharata, 1970
- Naim, Syafnir Aboe, *Tuaniku Imam Bonjol: Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau 1784-1832*, Padang; Esa Padang, 1993
- al-Palimbani, 'Abd al-Shamad, *Sayr Al-Sâlikin ilâ Ibâdah Rabb al-Âlamin*, Kairo: Dar al-Kutub al-Islamimiyah, 1953
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Noto Susanto (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, cet. ke-3, Edisi Pemutakhiran
- Raffles, Thomas Stamford, "Menuju Sumber Peradaban Melayu", dalam Anthony Reid, *Sumatera Tempo Doeloe: dari Marco Polo sampai Tan Malaka*, Terj. Tim Komunitas Bambu, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010
- Steenbrink, Karel, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1956-1942)*, Bandung: Mizan, 1995
- Suryadi, "Kata Pengantar" dalam J. C. Boelhouwer, *Kenang-Kenangan di Sumatera Barat Selama Tahun 1831-1834*, Terj. Sutan Sjahrial, Padang: Lembaga Kajian Gerakan Padri, (1803-1838) Kerjasama Gemu Minang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2009

Suryanegara, Ahmad Mansyur, *Api Sejarah*, Bandung: Salamadani, 2010, cet. ke-3

